

JURNAL SKRIPSI
KAJIAN TERHADAP PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH TERHADAP KLIEN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Diajukan oleh :

Arnita Ernauli Marbun

NPM : 110510550
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

JURNAL SKRIPSI
KAJIAN TERHADAP PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH TERHADAP KLIEN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Diajukan oleh :

Arnita Ernauli Marbun

NPM : 110510522
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL
KAJIAN TERHADAP PERAN KONSULTAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH TERHADAP KLIEN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Diajukan oleh :

Arnita Ernauli Marbun

NPM : 110510550

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 19 Desember 2014

Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum

Tanda tangan

: 

I. Judul Tugas Akhir : Kajian terhadap Peran Konsultan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah terhadap Klien yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Arnita Ernauli Marbun

Nama Dosen Pembimbing : Ch. Medi Suharyono

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Kajian terhadap Peran Konsultan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah terhadap Klien yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

This research entitled Review towards Role of Law Consultant on Problem Settlement of Client who as Victim of Criminal Action on Household Violence. The background of problem is that household violence is very complex, thus the law consultant should be able to demonstrate their competence. Therefore, they will be proper party on problem settlement complained by client, especially client who as victim of criminal action on household violence. The problem based on that background is what step conducted by law consultant to accompany such client. Steps conducted by law consultant to accompany such client is asking client identity and then ask client to tell out the occurred incident of violence and classified the experienced violence whether belong to form of physical, psychological, sexual or economic violence, offering solution with mediation or court way. And the final step if mediation way is not success is the settlement via court way by over it to pointed advocate.

Keywords : Law Consultant, Household Violence, and Client.

V. Pendahuluan

Latar Belakang : Manusia adalah makhluk sosial yang selalu dituntut untuk berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi antara yang satu dengan yang lainnya menciptakan suasana yang harmonis dalam hidup berdampingan. Interaksi dalam bentuk komunikasi seperti saling bertegur sapa, berbagi cerita, memberikan pendapat, dan berupaya mencari jalan keluar dari setiap permasalahan dapat membuat manusia merasakan bahwa dirinya tidak hidup seorang diri.

Setiap orang dalam menjalani kehidupan pasti tidak lepas dari permasalahan. Dinamika kehidupan yang dihadapi akan menuntut setiap orang agar peka dalam menjalani kehidupan, seperti dalam menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang ada sebenarnya bukan merupakan ancaman bagi manusia untuk dihindari tetapi justru sebagai tantangan hidup dan mengupayakan agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Menyelesaikan suatu masalah terkadang melibatkan pihak lain yang dianggap mampu dan pada akhirnya dapat memberikan hasil yang baik bagi para pihak yang bermasalah.

Pihak lain yang dapat memberikan titik terang dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa disebut dengan konsultan. Konsultan bertugas memberikan bantuan yang berupa nasehat-nasehat sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Konsultan yang dipandang atau sering ditunjuk dalam menyelesaikan permasalahan antar individu disebut dengan konsultan hukum. Konsultan hukum berbeda dengan advokat. Konsultan hukum adalah profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum di luar jalur pengadilan (*Non-*

Litigations), sedangkan advokat adalah profesi hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum melalui jalur pengadilan (*Litigations*).

Tugas dan kewenangan antara konsultan hukum dengan advokat memang berbeda, namun keduanya sama-sama menjadi pihak yang mempunyai fungsi sebagai pihak yang dianggap mampu dalam menyelesaikan suatu masalah. Seiring berjalannya waktu, konsultan hukum harus mampu mengatasi segala bentuk masalah yang semakin lama semakin kompleks dan memprihatinkan. Bantuan hukum berupa jasa hukum yang diberikan konsultan hukum harapannya mampu memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa tanpa harus melalui jalur pengadilan.

Seorang konsultan hukum selain mempunyai peran dalam menyelesaikan masalah juga mempunyai kewajiban yaitu tidak boleh membedakan pihak atau yang diistilahkan dengan klien. Setiap klien yang datang dengan maksud meminta bantuan harus diperlakukan sama tanpa ada perbedaan baik dari segi materi maupun nonmateri. Klien atau penerima bantuan hukum mempunyai hak atas bantuan hukum yang diberikan oleh konsultan hukum sesuai dengan kesepakatan. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin¹, dengan demikian jelas bahwa bantuan hukum menjadi hak bagi setiap orang.

Klien menjadi pihak yang tidak bisa lepas dari tugas seorang konsultan hukum, karena klien adalah pihak yang meminta bantuan hukum atas permasalahan yang dialaminya. Banyak perkara atau kasus yang dikeluhkan oleh klien, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya disebut KDRT.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Cetakan I, Surabaya : Anfaka Perdana, Hlm. 2.

KDRT merupakan salah satu pelanggaran Hak Azasi Manusia, karena di dalam sebuah rumah tangga ada pihak yang melakukan kekerasan terhadap pihak yang lain.

KDRT biasanya dilakukan oleh suami/ ayah terhadap isteri dan/ atau anak.

KDRT yang menimpa baik isteri maupun anak tentu menjadi kabar yang memprihatinkan, namun kasus ini sudah sering terjadi sehingga bukan merupakan hal yang baru di masyarakat. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mencapai 57,9% pada tahun 1998, di India mencapai 49% pada tahun 1999, di Bangladesh mencapai 60% di tahun 2000, dan di Indonesia sendiri sekitar 24 juta perempuan atau sekitar 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami.² Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak penduduk perempuan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan juga semakin besar.

KDRT yang terjadi baik dalam ikatan suami isteri maupun orangtua anak khususnya ayah dengan anak menunjukkan bahwa tujuan dari ikatan suatu perkawinan tidaklah tercapai. Tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga keluarga yang bahagia lahir dan batin.³

Kekerasan juga sering terjadi terhadap anak. Anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga akan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat inmaterial seperti goncangan emosional dan

² Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan III, 2012, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 2.

³ Ibid, Hlm. 62.

psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak.⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Masalah kekerasan dalam rumah tangga memang sangat kompleks, untuk itu sebagai konsultan hukum harus mampu menunjukkan kompetensinya sehingga dapat menjadi pihak yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikeluhkan oleh klien khususnya klien yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik isteri maupun anak yang menjadi korban kekerasan rumah tangga pasti membutuhkan perlindungan agar hak-haknya tidak dirampas, hal ini juga menjadi tugas seorang konsultan hukum. Sutyoso memberi istilah bahwa konsultan hukum adalah dokter kemasyarakatan, artinya seorang konsultan hukum yang hidup di tengah masyarakat, senantiasa sedapat mungkin menunjukkan sikap-sikap yang *correct* lagi sportif, setiap persoalan hukum yang dimintakan penjelasannya atau nasehatnya, sedapat mungkin ia bisa menjelaskan atau menyelesaikan dengan benar.⁶

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dilakukan penelitian dengan judul “Kajian terhadap Peran Konsultan Hukum dalam Menyelesaikan Masalah terhadap Klien yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

⁴ Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan I, 2012, Bandung : Refika Aditama, Hlm. 2.

⁵ Ibid, Hlm. 4.

⁶ Jeremias, Lemek, *Mencari Keadilan*, Cetakan I, 2007, Yogyakarta : Galangpress, Hlm. 43.

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dirumuskan masalah langkah apakah yang dilakukan konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum tentang Peran Konsultan Hukum

1. Pengertian Konsultan Hukum

konsultan hukum adalah mereka yang diangkat oleh menteri kehakiman untuk memberi konsultasi hukum di luar pengadilan sebagai mata pencaharian pokok.⁷

2. Misi Pendirian Konsultan Hukum

Misi pendirian konsultan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.⁸

3. Hak dan Kewajiban Konsultan Hukum

Hak konsultan hukum terhadap klien sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, konsultan hukum berhak melakukan pelayanan bantuan hukum, konsultasi hukum, perlindungan hukum selama menjalankan pemberian bantuan hukum, dan hal-

⁷ Ibid, Hlm. 75.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Cetakan I, Surabaya : Anfaka Perdana, Hlm. 5.

hal lain yang berkaitan dengan pemberian pendampingan hukum terhadap klien. Kewajiban konsultan hukum terhadap klien sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni konsultan hukum wajib menjaga kerahasiaan data klien yang bersangkutan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang dialami oleh klien yang bersangkutan.

B. Tinjauan Umum tentang Klien

1. Hak dan Kewajiban Klien

Klien atau penerima bantuan hukum tidak hanya orang miskin saja, tetapi siapapun yang mengalami masalah dan menyelesaikannya melalui jasa konsultan hukum juga disebut dengan klien atau penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/ atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur tentang kewajiban penerima bantuan hukum agar dapat memperoleh bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum dalam bentuk syarat-syarat. Syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah sesuai dengan kondisi klien yang dalam hal ini klien adalah pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Klien Kasus KDRT

Klien kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu seseorang atau beberapa orang yang mendapat perlakuan tidak baik oleh orang yang berada dalam satu rumah tangga. Artinya bahwa baik korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan mempunyai hubungan yang dekat bahkan sedarah, seperti kekerasan yang menimpa seorang isteri oleh suaminya atau kekerasan yang menimpa seorang anak oleh ayah kandung/tirinya.

C. Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana KDRT

1. Pengertian Korban

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁹

⁹ Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan I, 2000, Yogyakarta : Graha Ilmu, Hlm. 49.

2. Pengertian Tindak Pidana KDRT

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

3. Bentuk-Bentuk KDRT

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).¹⁰

D. Peran Konsultan Hukum dalam Mendampingi Klien yang Menjadi Korban Tindak Pidana KDRT

Konsultan hukum mempunyai peran yaitu mendampingi klien dalam hal ini adalah klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Konsultan hukum mempunyai batas kewenangan yaitu tidak diperkenankan beracara di dalam pengadilan, karena yang berwenang untuk beracara di pengadilan adalah advokat atau penasehat hukum. Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban

¹⁰ Moerti, Op. Cit, Hlm. 83.

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sedapat mungkin dapat mengurangi penyelesaian melalui jalur pengadilan.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsultan hukum dalam mendampingi klien yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Konsultan hukum setelah menanyakan identitas klien, selanjutnya konsultan hukum meminta klien untuk menyampaikan kronologis peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, kemudian mengklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau kekerasan ekonomi;
2. Konsultan hukum wajib menawarkan penyelesaian dari suatu masalah yang dialami oleh klien diselesaikan secara mediasi atau melalui jalur pengadilan; dan
3. Apabila proses mediasi tidak berhasil dan klien menghendaki untuk diselesaikan secara litigasi, maka konsultan hukum akan menunjuk advokat untuk menangani kasus tersebut

B. Saran

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang umum didengar oleh sebagian besar masyarakat khususnya di Indonesia. Perempuan sebagai pihak yang rawan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sudah seharusnya dilindungi oleh aparat penegak hukum. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini,

saran saya adalah meningkatkan kualitas seorang konsultan hukum, sehingga klien yang mengalami permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan III, 2012, Jakarta : Sinar Grafika.

Maidin, Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan I, 2012, Bandung : Refika Aditama.

Jeremias, Lemek, *Mencari Keadilan*, Cetakan I, 2007, Yogyakarta : Galangpress.

Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan I, 2000, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Cetakan I, Surabaya : Anfaka Perdana.